

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan tindak pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai tugas dan wewenang serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, namun perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih kerap terjadi. Perselisihan itu bahkan sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Misalnya saja masyarakat mengkritik tentang adanya rebutan kewenangan menyidik perkara tindak pidana korupsi antara polisi dan KPK dalam kasus cicak dan buaya, bahwa dua lembaga penegak hukum tersebut oleh sebagian masyarakat dinilai merupakan wujud perebutan kekuasaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu”. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kritikan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas ini merupakan dampak adanya berbagai regulasi tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan bahkan muncul lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yaitu KPK. Regulasi yang mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan diatur oleh beberapa undang-undang sehingga perlu sinkronisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang sama-sama mengatur mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ada 2 macam jenis sinkronisasi kewenangan dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda maka sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sinkronisasi secara horizontal dan vertikal.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal dilakukan, bila peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah peraturan-peraturan yang mengatur bidang tertentu yang berbeda, akan tetapi derajatnya sama.<sup>1</sup> Sementara apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, kemudian peraturan tersebut akan diuji sinkronisasinya (keserasiannya) dengan norma dasar (*grundnorm*) maka jenis sinkronisasi tersebut adalah sinkronisasi secara vertikal. Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal yaitu peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah peraturan-peraturan yang

---

<sup>1</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, “*Metode Penelitian Hukum*”, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 39.

mengatur bidang tertentu yang sama, akan tetapi derajatnya berbeda.<sup>2</sup> Sinkronisasi secara vertikal dapat dilihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Aturan Perundang-undangan Indonesia jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya. Kasus-kasus tersebut adalah:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 38.

1. Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 119/PID. B/2005/PN.SKA. dengan terdakwa pimpinan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 yang terjadi tahun 2005 penyidikan dilakukan oleh Polwil Surakarta dan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri surakarta.
2. Kasus Korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 140/ Pid. B/ 2006/PN.SKA. dengan terdakwa Mantan Walikota Surakarta masa jabatan 2000-2005 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.
3. Kasus Korupsi penggunaan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan terdakwa sebagai Deputy Gubernur BI yang terjadi tahun 2008 penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>3</sup>

Oleh karena itu perlu adanya sebuah kajian ilmiah terhadap peraturan perundangan melalui sebuah penelitian dengan pendekatan normatif. Salah satu bentuk penelitian normatif<sup>4</sup> adalah sinkronisasi peraturan hukum secara vertikal maupun horizontal, dan ini akan dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji peraturan hukum yang mengatur tugas, kewajiban, dan kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi

---

<sup>3</sup>Lihat Okezon.com, 3 november 2008, *artikel setelah aulia pohan jadi tersangka, dalam* <http://news.okezone.com/read/2008/11/03/58/160007/setelah-aulia-pohan-jadi-tersangka>, diunduh, 11 mei 2012, Pukul 20:32.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukun Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, halaman 85 menyebutkan bahwa penelitian normatif terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horisontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama . Lihat juga Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Op.cit.*, halaman 38.

yang diberi judul **“SINKRONISASI REGULASI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana sinkronisasi peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui kesinkronan peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif

#### **D. Manfaat Penelitian**

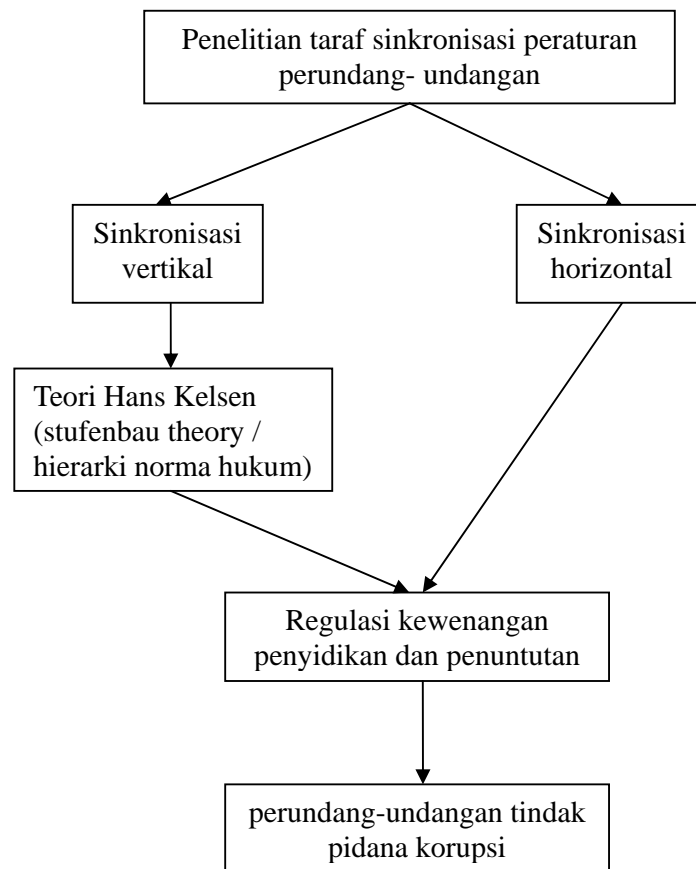
1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan hukum dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik yang masih berupa hipotesis maupun kesimpulan terakhir.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai instansi mana saja yang dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan sinkronisasi atas kewenangan tersebut dalam tindak pidana korupsi sesuai ketentuan normatif yang ada.
- b. Dapat memberikan masukan pada praktisi hukum, akademisi, maupun mahasiswa di fakultas hukum khususnya yang ingin mengetahui secara mendalam tentang penanganan tindak pidana korupsi secara notmatif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## E. Kerangka Pemikiran



Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan sinkronisasi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dari peraturan dasar (*grundnorm*) yang berupa konstitusi UUD Tahun 1945 secara hierarki sampai peraturan-peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Hierarki perundang-undangan sejalan dengan ajaran Hukum Murni, Hans Kelsen mengemukakan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory* - *Stufenbau des Recht*). Ajaran *Stufenbau* berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hirarki dari hukum. Pada hirarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Dan ketentuan yang tertinggi ini ialah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi*", Semarang: Sinar Grafika, Hal. 69.

<sup>6</sup> Amani deniro, 2011, *teori stufenbau diindonesia*,  
<http://ubharalawhukum.blogspot.com/2011/05/masalah-penerapan-stufenbau-teori.html>, diunduh

Dari teori Hans Kelsen mengemukakan teori Hierarchy Norma Hukum (Stufenbau Theory - Stufenbau des Recht). Ajaran Stufenbau berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarchy dari hukum digunakan sebagai syarat dalam melakukan penelitian normatif terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan di mana melalui penelitian tersebut, diawali dengan melakukan inventarisir dan kemudian disusun secara kronologis atau secara hierarki (sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, diperbaharui dengan TAP MPR No. IX/MPR/1978, dan terakhir dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya;
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum;



5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.<sup>7</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya. Hierarki tata urutan perundang-undangan adalah kumpulan norma-norma. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

## **F. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amani deniro, 2011, *Teori Stufenbau di Indonesia*, <http://ubharalawhukum.blogspot.com/2011/05/masalah-penerapan-stufenbau-teori.html>, diunduh jumat, 11 mei 2012, Pukul 20:32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal 15.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis,<sup>9</sup> yaitu menggambarkan keadaan objek dan masalahnya serta menganalisa dan memberi kesimpulan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yakni mengenai pengaturan kewenangan instansi-instansi penegak hukum dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan dan sinkronisasinya menurut ketentuan normatif tentang penanganan tindak pidana korupsi.

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dibagi sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 97-98.

Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, *paper* seminar, hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Study kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai dasar pendukung. Dalam study kepustakaan ini penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisa Data

Skripsi ini menggunakan metode analisa data kualitatif dengan model interaktif maksudnya penulis melakukan inventarisasi, dan kemudian disusun secara kronologis atau secara hierarchis kemudian menganalisis kesinkronan dari semua peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir dan dipilih sebagai objek yang akan dikaji yang meliputi sinkronisasi tentang: konsiderannya, penjelasan umumnya, pasal demi pasalnya<sup>10</sup> Selain itu penulis juga melakukan analisis dengan metode *content analysis*.

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.Cit.*, hal 39.

## **G. Sistematika Skripsi**

Suatu kerangka penelitian berupa sistematika skripsi berguna untuk memberikan diskripsi secara menyeluruh (holistic) terhadap penelitian yang dilakukan Penulis. Untuk itu Penulis menguraikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Secara Normatif, Stufenbay Theori ( Hans Kelsen )

Hasil penelitian dan analisis data yang berisi tentang regulasi tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, dan Pembahasan mengenai sinkronisasi peraturan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh instansi penegak hukum yang berbeda namun secara atributif diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan dan penuntutan menurut hukum positif

Bab VI merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.